

**MEKANISME SELEKSI PERANGKAT DESA BERDASARKAN  
PERATURAN BUPATI NO. 56 TAHUN 2018 PASCA PUTUSAN MA  
NO. 28 P/HUM/2018 DITINJAU DARI *FIQH SIYASAH*  
(Studi Kasus di Desa Kunjang, Kecamatan Kunjang, Kabupaten Kediri)**

**SKRIPSI**

**Oleh:**

**Daimatun Maslahatul Ummah**

**NIM. C95216101**



**Universitas Islam Negeri Sunan Ampel**

**Fakultas Syariah dan Hukum**

**Jurusan Hukum Publik Islam**

**Prodi Hukum Tata Negara**

**Surabaya**

**2020**

## PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Daimatun Maslahatul Ummah  
NIM : C95216101  
Fakultas/Jurusan/Prodi : Syariah dan Hukum/Hukum Publik Islam/Hukum  
Tata Negara  
Judul Skripsi : Mekanisme Seleksi Perangkat Desa di Kabupaten  
Kediri Berdasarkan Peraturan Bupati No. 56 Tahun  
2018 Pasca Putusan MA No. 28 P/HUM/2018  
Ditinjau dari *Fiqh Siyasah* (Studi Kasus di Desa  
Kunjang, Kecamatan Kunjang, Kediri)

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 9 Juli 2020

Saya Menyatakan

  
Daimatun Maslahatul Ummah

NIM. C95216101

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Dalam hal ini menerangkan bahwa skripsi yang ditulis oleh Daimatun Maslahatul Ummah, NIM. C95216101 telah diperiksa dan disetujui untuk diujikan dalam ujian munaqosah/skripsi.

Surabaya, 9 Juli 2020

Pembimbing



Suvikho, S.Ag., MH.

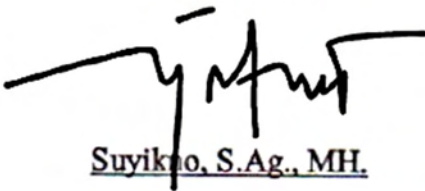
**NIP. 197307052011011001**

## PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Daimatun Maslahatul Ummah NIM. C95216101 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya pada hari Selasa, 4 Agustus 2020, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan Program Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Syariah dan Hukum.

Majelis Munaqasah Skripsi:

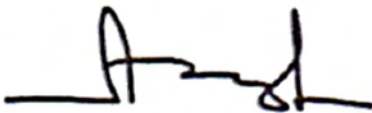
Penguji I,



Suyikno, S.Ag., MH.

NIP.197307052011011001

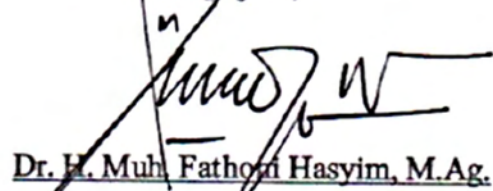
Penguji III,



Arif Wijaya, SH., M.Hum.

NIP. 197107192005011003

Penguji II,



Dr. H. Muhi Fathori Hasyim, M.Ag.

NIP.195601101987031001

Penguji IV,



Achmad Safiudin R. MH.

NIP. 199212292019031005

Surabaya, 4 Agustus 2020

Mengesahkan,

Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Dekan,



Dr. H. Masruhan, M. Ag

NIP. 195904041988031003



**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA**  
**PERPUSTAKAAN**

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300

E-Mail: [perpus@uinsby.ac.id](mailto:perpus@uinsby.ac.id)

---

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Daimatun Maslahatul Ummah  
NIM : C95216101  
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/Hukum Publik Islam  
E-mail address : [daimatunm@gmail.com](mailto:daimatunm@gmail.com)

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Skripsi     Tesis     Desertasi     Lain-lain  
(.....)

yang berjudul :

**MEKANISME SELEKSI PERANGKAT DESA BERDASARKAN  
PERATURAN BUPATI NO. 56 TAHUN 2018 PASCA PUTUSAN MA  
NO. 28 P/HUM/2018 DITINJAU DARI *FIQH SIYASAH*  
(Studi Kasus di Desa Kunjang, Kecamatan Kunjang, Kediri)**

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/formatkan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 30 September 2020  
Penulis

(Daimatun Maslahatul Ummah)

































tentang bagaimana pelaksanaan pengisian perangkat desa di Desa Timbulharjo menurut Peraturan Daerah No. 5 Tahun 2018 tentang Perangkat Desa serta faktor apa sajakah yang menjadi pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan tersebut.<sup>15</sup> Sedangkan dalam skripsi yang akan diteliti oleh peneliti membahas tentang Mekanisme Seleksi Perangkat Desa Berdasarkan Peraturan Bupati No. 56 Tahun 2018 Pasca Putusan MA No. 28 P/HUM/2018.

2. Ariq Anjar Rachman dalam skripsi yang berjudul “Pengisian Perangkat Desa Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 128/PUU-XIII/2015 dan Implikasi Yuridisnya terhadap Peraturan Pemerintah Desa” penelitian ini menjelaskan tentang batasan domisili perangkat desa yang sekurang-kurangnya satu tahun sebelum pendaftaran perangkat desa. Namun setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi No. 128/PUU-XIII/2015 di mana hakim mengabulkan terkait domisili perangkat desa tidak harus di desa setempat.<sup>16</sup> Sedangkan dalam skripsi yang akan diteliti oleh peneliti membahas tentang Mekanisme

---

<sup>15</sup> Rachmi Agisari, “Peng Pengisian Perangkat Desa di Desa Timbulharjo Kecamatan Sewon Kabupaten Bantul Menurut Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perangkat Desa” (Skripsi—Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta 2018)

<sup>16</sup> Ariq Anjar Rachman, “Pengisian Perangkat Desa Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 128/PUU-XIII/2015 dan Implikasi Yuridisnya terhadap Peraturan Pemerintah Desa” (Skripsi—Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2018)



berdasarkan Peraturan Kabupaten No. 56 Tahun 2018 pasca putusan MA No. 28 P/HUM/2018 di Desa Kunjangan Kecamatan Kunjangan Kabupaten Kediri, sehingga diperoleh uraian tentang bagaimana mekanisme seleksi perangkat desa dalam Undang-Undang tersebut.

2. Penelitian ini bertujuan untuk meninjau dari sudut pandang *fiqh siyasah* terhadap seleksi perangkat desa berdasarkan Peraturan Bupati No. 56 Tahun 2018 pasca putusan MA No. 28 P/HUM/2018, sehingga diperoleh penjelasan bagaimana seleksi perangkat desa pasca putusan MA dari sudut pandang *fiqh siyasah*.

#### **F. Kegunaan Hasil Penelitian**

Dari permasalahan di atas, peneliti mengharapkan ini bermanfaat baik untuk peneliti sendiri maupun pembaca, adapun untuk dua aspek, yaitu:

1. Secara Teoritis
  - a. Diharapkan bermanfaat untuk pengembangan ilmu pengetahuan tentang Mekanisme Seleksi Perangkat Desa di Kabupaten Kediri berdasarkan Peraturan Bupati No. 56 Tahun 2018 Pasca Putusan MA No. 28 P/HUM/2018, dari sudut pandang hukum positif dan *fiqh siyasah*.
  - b. Memberikan tambahan pemikiran dalam mengembangkan dan menambah khazanah keilmuan hukum Islam mahasiswa/i





































dan UUD RI Tahun 1945, Bahasa Indonesia, Pengetahuan Umum, Matematika, Pengetahuan Dasar Komputer, dan Psikotes.

Setelah dilakukannya tiga tahapan tersebut (pembentukan tim, penjaringan, dan penyaringan) calon Perangkat Desa yang telah terpilih sebagai perangkat desa, akan dilantik dan mengucapkan sumpah janji yang dilaksanakan paling lama 7 (tujuh) hari setelah adanya Keputusan Kepala Desa. Dalam hal masa jabatan Perangkat Desa, dalam Pasal 26 Peraturan Daerah Kabupaten Kediri No. 5 Tahun 2017 yaitu sampai dengan berusia 60 (enam puluh) tahun.

Dan apabila dalam masa jabatan Perangkat Desa terdapat kekosongan jabatan, dijelaskan dalam Pasal 32 Peraturan Daerah Kabupaten Kediri No. 5 Tahun 2017, maka tugas Perangkat Desa yang kosong akan dilaksanakan oleh Pelaksana Tugas yang memiliki posisi jabatan dari unsur yang sama dan pengisian jabatan Perangkat Desa yang kosong tersebut, selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sejak Perangkat Desa yang bersangkutan berhenti.

Dapat disimpulkan bahwa Mekanisme Seleksi Perangkat Desa dilakukan melalui 3 (tiga) tahapan, yakni tahap administrasi, tahap ujian tertulis, dan tahap ujian keterampilan (komputer). Namun, sebelum tahapan tersebut, Kepala Desa membentuk Tim Pengisian dan Pengangkatan Perangkat Desa terlebih dahulu.











































































belum maksimal, hal ini dapat dilihat dari masih adanya keterlibatan Pemerintah Daerah dalam pemilihan Tim Pengangkatan Perangkat Desa dan masih banyaknya masyarakat yang belum mengetahui aturan-aturan hukum yang berlaku terkait Pengangkatan Perangkat Desa. Meskipun dalam tata urutan dalam Melaksanakan Seleksi Perangkat Desa telah sesuai dengan Peraturan Daerah No. 5 Tahun 2017 dan Peraturan Bupati No. 56 Tahun 2018. Namun masih perlu adanya penegasan terhadap hukum yang dijalankan agar Pemerintah Daerah tidak ikut campur dalam pemilihan perangkat desa, dan masih perlu adanya sosialisasi lebih lanjut terkait aturan-aturan yang dibuat oleh Pemerintah Daerah. Agar masyarakat Desa Kunjang mengetahui terkait aturan-aturan yang sedang berlaku dan hak konstitusional masyarakat tidak dilanggar dengan semena-mena.































- Kusuma Putra Candra, Ratih Nur Pratiwi, Suwondo. *Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa*. Jurnal Administrasi Publik, vol I, No. 6.
- Mahmud. *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung. Pustaka setia. 2011.
- Masruhan. *Metodologi Penelitian Hukum*. Surabaya: Hilal Pustaka. 2013.
- Nasution. *Metode Research, (Penelitian Ilmiah)*. Jakarta: Bumi Aksara. 2008.
- Nurman. *Strategi Pembangunan Daerah*. Jakarta: Rajawali Pers. 2015.
- Peraturan Bupati No. 56 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kediri No. 7 Tahun 2017 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa.
- Perda Kabupaten Kediri No. 5 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa.
- Putusan Mahkamah Agung Nomor 28 P/HUM/2018.
- Pulungan, Suyuthi. *Fikih Siyash : Ajaran Sejarah dan Pemikiran*. Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2014.
- Profil Desa Kunjang Kec. Kunjang Kab. Kediri
- Syafieq Ghorbal Muhammad. *Al-Mansu'ahal al-Arobiyah al-Muyassaroh*. al-Qahiroh: Darul Qalam. 1945.
- Tim Penyusunan Fakultas Syariah dan Hukum Uin Sunan Ampel Surabaya. *Petunjuk Penulisan Skripsi*. Surabaya: Fakultas Syariah Uin Sunan Ampel Surabaya. 2014.
- Tamwif, Irfan. *Metodologi Penelitian*. Surabaya: UINSA Press. 2014.
- Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa.
- Wawancara dengan Ibu Ninik, Pj. Kepala Desa, di Kantor Kelurahan Desa Kunjang pada 16 Desember 2019, pukul 09:30 WIB.
- Wawancara dengan Pak Masdukin, Perangkat Desa, di Kantor Kecamatan Desa Kunjang pada 13 Desember 2019, pukul 13:00 WIB.

